

IMPLEMENTASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SEBAGAI BAGIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA AKUNTABILITAS PUBLIK DAN TRANSPARANSI

I Made Agus Suteja¹
I G A N Budiasih²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
Email: sutejamades@ymail.com

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk mengetahui pengaruh Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Akuntabilitas Publik. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui pengaruh Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Transparansi. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Sampel yang digunakan adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung-Bali sejumlah 53. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif pada Akuntabilitas Publik dan Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif pada Transparansi. Semakin meningkat Akuntabilitas Publik maka Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran juga semakin meningkat. Transparansi meningkat maka Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran meningkat. Untuk pelaksanaan laporan pertanggungjawaban didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah, karena Standar Akuntansi Pemerintah merupakan alat untuk memfasilitasi pelaporan untuk peningkatan Akuntabilitas Publik dan Transparansi.

Kata kunci: Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Akuntabilitas Publik, Transparansi

ABSTRACT

There are two goals in this research. The first goal is to know the effect of implementing budget realization document toward public accountability and the second goal is to know the effect of implementing budget realization document toward transparency. Purposive sampling was chosen as the sampling method and 53 local government work units were used as sample. The result of the discussion shows that implementing the budget realization document gives positive effect to public accountability and transparency. The more increasing public accountability will make budget realization document improve on the same way. In addition, the more increasing the transparency also will make budget realization document improve as well. Government accounting standard is used as the basis of accountability report. It is due to the reason that government accounting standard is a tool to facilitate the report for the improvement of public accountability and transparency.

Keywords: *Implementation of budget realization document, Public accountability, Transparency*

PENDAHULUAN

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, manajemen keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Badung mengalami perubahan yaitu reformasi penganggaran. Reformasi penganggaran dari sistem penganggaran tradisional (*line item budgeting*) ke penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*). Penganggaran tradisional (*line item budgeting*) merupakan penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal dan untuk apa dana tersebut digunakan, sedangkan penganggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*) merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi (Bastian, 2006).

Line item budgeting mempunyai sejumlah karakteristik penting, dimana tujuan utamanya adalah untuk melakukan kontrol keuangan, dan sangat berorientasi pada input organisasi, penetapannya melalui pendekatan *incremental* (kenaikan bertahap) (Pendlebury, 1998) dan tidak jarang dalam prakteknya memakai kemampuan menghabiskan atau menyerap anggaran sebagai salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan organisasi.

Pelaksanaan karakteristik tersebut mempunyai sejumlah kelemahan. Pada rezim pemerintahan yang sarat dengan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, seringkali pelaksanaannya hanya sebatas aspek administratifnya saja. Dengan demikian sistem anggaran tidak memberikan informasi kinerja. Akibatnya efektivitas kinerja menjadi berkurang. Menetapkan rencana anggaran dengan cara menaikkan jumlah tertentu pada jumlah anggaran yang lalu atau sedang berjalan tanpa

memperhatikan tingkat keberhasilan setiap program. Pendekatan ini tidak dilakukan untuk menganalisis setiap program. Sehingga mengakibatkan kurang tersedianya informasi yang logis dan rasional terkait rencana alokasi anggaran tahun berikutnya. Pada prakteknya sering terjadi perilaku birokrat yang berusaha untuk menghabiskan anggaran tanpa memperhatikan kualitas dan hasil yang diperoleh. Masalah yang dihadapi oleh sistem line item budgeting disebabkan karena kelemahan dari sistem ini.

Karakteristik tersebut bertolak belakang dengan sistem penganggaran berbasis kinerja. Secara umum penganggaran berbasis kinerja mengandung tiga unsur pokok yaitu : pengeluaran pemerintah diklasifikasikan menurut program dan kegiatannya, pengukuran hasil kinerja, dan pelaporan program. Selain itu titik perhatian lebih ditekankan pada pengukuran hasil kerja, bukan pada pengawasan, dan setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan memaksimalkan *output*. Tujuan daripada penganggaran berbasis kinerja adalah untuk menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang dapat digunakan untuk evaluasi pelaksanaan kerja (Bastian, 2006).

Pelaksanaan sistem penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja untuk selama satu tahun anggaran yang dimulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Balanja Daerah pelaksanaannya disebut dengan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (Permendagri, 2006).

Dokumen pelaksanaan anggaran terdiri terdiri dari 3 (tiga) dokumen yaitu (Depkeu, 2006):

- 1) Daftar Isian Kegiatan untuk pedoman pelaksanaan belanja Anggaran Rutin.
- 2) Daftar Isian Proyek untuk pedoman pelaksanaan belanja pembangunan.
- 3) Daftar Isian Kegiatan Suplemen sebagai acuan dalam melaksanakan anggaran belanja yang sumbernya dari bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Ketiga dokumen tersebut diharapkan dapat mencerminkan integrasi penganggaran dan berorientasi pada kerangka pengeluaran berjangka menengah dan standar akuntansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem penganggaran menekankan pada beberapa prinsip yaitu apa yang dikenal dengan '*The Three Es*' yaitu Ekonomis, Efisien, dan Efektif (Bastian, 2006). Selanjutnya muncul sejumlah prinsip dalam sistem penganggaran dalam masyarakat yaitu demokratis, adil, transparan, bermoral tinggi, berhati-hati, dan akuntabel. Kemudian muncul konsep '*good governance*' yang sangat menekankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi (Bastian, 2006).

Tata pemerintahan yang baik dilandasi oleh prinsip-prinsip utama sehingga tercapainya *good governance*. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga mengemukakan bahwa syarat agar terwujudnya pemerintahan yang baik terkait pengelolaan keuangan negara adalah dengan melaksanakan akuntabilitas publik dan transparansi. Apabila suatu lembaga pemerintahan memiliki akuntabilitas dan transparansi yang baik maka akan menopang peningkatan prinsip-prinsip penganggaran lainnya.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu organisasi yang bertanggung jawab kepada siapa dan untuk apa organisasi bertanggung jawab. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, mengungkapkan, menyajikan dan melaporkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Makna akuntabilitas merupakan konsep filosofis inti manajemen sektor publik. Pada *konteks* organisasi pemerintahan sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan *disclosure* atas aktivitas dan kinerja financial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut (Mahsun, 2006).

Akuntabilitas publik pemerintah daerah yaitu pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas kinerja-kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2007). Pemerintah daerah menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk diberitahu, hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk didengar aspirasinya. Akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk

memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan serta dituntut untuk tidak sekedar melakukan pelaporan kepada pemerintah pusat, akan tetapi juga melakukan pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat luas. Semua ketentuan diatas juga berlaku pada pemerintah pusat yang pelaksanaan pengelolaan keuangannya untuk peningkatan akuntabilitas publik.

Transparansi memiliki arti keterbukaan (*openness*), yaitu keterbukaan pemerintah memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi (Mahmudi, 2007). *Transparency* (transparansi) merupakan kondisi adanya keterbukaan secara penuh, juga merupakan salah satu elemen penopang akuntabilitas. Dengan demikian transparansi merupakan kunci untuk membangun lingkungan yang memiliki akuntabilitas. Lingkungan tanpa transparansi berarti ada suatu agenda yang tersembunyi. Juga berarti suatu lingkungan yang tidak memiliki kepercayaan dan memiliki akuntabilitas yang rusak (Mahsun, 2006).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003).

Fenomena yang dapat diamati pada Pemerintah Kabupaten Badung terkait Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah adanya kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang kegiatannya tidak dapat terlaksana padahal kegiatan tersebut sudah masuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga anggaran yang telah dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah kembali ke kas daerah. Penyebab tidak terlaksananya kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu karena persyaratan yang diajukan oleh pihak ketiga tidak lulus verifikasi serta spesifikasi yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sehingga kegiatan tersebut batal lelang. Data yang terkait dengan fenomena diatas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.

Data Jumlah Kegiatan, Realisasi Kegiatan dan Batal Lelang Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2014

Tahun Anggaran	Jumlah Kegiatan	Realisasi Kegiatan	Batal Lelang
2012	572	551	21
2013	504	499	5
2014	529	518	11

Sumber: Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Badung (2015)

Berdasarkan Tabel 1 jumlah kegiatan pada tahun 2012 sebanyak 572 kegiatan realisasi 551 yang batal lelang 21 kegiatan. Untuk tahun 2013 jumlah kegiatan sebanyak 504 realisasi 499 batal lelang 5 kegiatan. Tahun 2014 jumlah kegiatan 529 relisasi 518 batal lelang 11 kegiatan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung berpedoman pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2010 sampai

dengan Tahun 2014 belum pernah dilakukan evaluasi, sehingga perlu dilakukan pengukuran pada pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan prinsip penganggaran yang menekankan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan negara untuk akuntabilitas publik dan transparansi.

Penemuan mengenai implementasi anggaran dilakukan oleh Antoro (2006) memperoleh hasil penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai bentuk perwujudan reformasi anggaran mampu meningkatkan akuntabilitas publik Pemerintah Daerah. Auditya (2013) menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif pada kinerja pemerintah daerah sedangkan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif pada kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. Dwiningsih (2006) menyatakan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya terlaksana. Berdasarkan teori tersebut maka hipotesis pertama (H_1) dirumuskan sebagai berikut:

H_1 : Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif pada Akuntabilitas Publik.

Ismiarti (2013) menyatakan bahwa implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja. Rahmannurrasjid (2008) menjelaskan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mengharuskan pemerintah memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat. Teodorus (2007) menyatakan penerapan

anggaran berbasis kinerja melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik dan transparansi. Werimon (2007) menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi menyebabkan kontrol yang besar dari masyarakat menyebabkan pengelola pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik. Berdasarkan teori tersebut maka hipotesis kedua (H_2) dirumuskan sebagai berikut:

H_2 : Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif pada Transparansi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Badung yang terletak di Jalan Raya Sempidi Mengwi Badung Bali. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan April 2015 sampai dengan bulan Juni 2015. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2009: 115). Populasi dari penelitian ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Badung. Metode pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu penentuan sampel terhadap yang memenuhi kriteria tertentu (Cooper, 2006). Sampel yang digunakan adalah Seluruh Satuan Kerja Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung sejumlah 53 Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berikut adalah penjelasan mengenai definisi oprasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

1) Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah penerapan anggaran yang dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran (Permendagri, 2006). Pengukuran Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran menggunakan kuesioner yang di adopsi dari Teodorus (2007) terdiri dari 10 *item* dimensi yaitu:

- (1) Isi Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan telah sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja.
- (2) Isi Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ditetapkan telah mencerminkan prioritas-prioritas kebutuhan masyarakat seperti tertuang dalam Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (RKA-KL).
- (3) Isi Dokumen Pelaksanaan Anggaran menunjukkan tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi.
- (4) Setiap sasaran dari program kegiatan mempunyai indikator kinerja yang tepat.
- (5) Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran mencerminkan penganggaran yang menggunakan prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas.

- (6) Pencapaian hasil kerja (*output* dan *outcome*) diutamakan dalam pelaksanaan anggaran.
 - (7) Besarnya nominal (Rp) tiap-tiap pos anggaran ditentukan bukan dengan menambah atau mengurangi jumlah anggaran tahun sebelumnya.
 - (8) Anggaran setiap program dan kegiatan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja.
 - (9) Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas publik.
 - (10) Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat meningkatkan transparansi.
- 2) Akuntabilitas publik adalah kewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Suryadhi, 2007). Pengukuran Akuntabilitas Publik menggunakan kuesioner yang di adopsi dari Antoro (2006) terdiri dari 8 *item* dimensi yaitu:
- (1) Laporan pertanggungjawaban keuangan telah diungkapkan secara lengkap dan relevan sesuai dengan kebutuhan.
 - (2) Laporan pertanggungjawaban kinerja sudah memberikan informasi tentang kinerja yang sesungguhnya.
 - (3) Laporan pertanggungjawaban sudah disampaikan tepat waktu.
 - (4) Laporan pertanggungjawaban mudah dipahami.
 - (5) Laporan pertanggungjawaban menunjukkan pencapaian hasil-hasil program kegiatan secara efektif.

- (6) Pertanggungjawaban pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sudah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas (publik).
 - (7) Pengendalian keuangan instansi semakin baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.
 - (8) Laporan pertanggungjawaban mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada instansi.
- 3) Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya (Meuthia, 2000). Pengukuran Transparansi menggunakan kuesioner yang di adopsi dari Teodorus (2007) terdiri dari 7 *item* dimensi yaitu:
- (1) Ketersediaan informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran kepada publik sudah tersedia untuk umum.
 - (2) Dokumen publik tentang anggaran mudah diakses masyarakat.
 - (3) Laporan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara berkala telah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan masyarakat (publik).
 - (4) Laporan pertanggungjawaban tahunan disajikan tepat waktu
 - (5) Transparansi anggaran meningkat jika usulan masyarakat diakomodasi.
 - (6) Transparansi dapat ditingkatkan dengan mengumumkan kebijakan anggaran kepada masyarakat.
 - (7) Pemerintah Kabupaten Badung sudah transparan dalam pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2009:199). Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang di adopsi dari kuesioner Antoro (2006) dan Teodorus (2007). Dalam menjawab pernyataan kuesioner kesungguhan responden merupakan suatu hal yang sangat penting karena keabsahan atau validitas hasil penelitian ditentukan oleh alat pengukur instrumen yang digunakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap instrumen penelitian yang meliputi pengujian validitas dan reliabilitas.

1) Uji validitas

Uji validitas bertujuan untuk menguji seberapa baik instrumen penelitian mengukur konsep yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2009:172). Pengujian validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pernyataan dengan total skor (analisis *pearson correlation*). Syarat minimum suatu kuesioner untuk memenuhi validitas adalah jika r bernilai minimal 0,3. Nilai korelasi antar skor item dengan total item kemudian dibandingkan dengan r kritis (0,30). Jika korelasi terhadap item skor total lebih besar dari kritis (0,30) maka instrumen penelitian tersebut dikatakan valid.

2) Uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ikhsan, 2008: 213). Reliabilitas atau

keandalan instrumen menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama (Sugiyono, 2009:173). Ghozali (2009: 46) menyatakan suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60.

Untuk mengolah data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner digunakan metode Statistika Analisis regresi linier sederhana dengan bantuan SPSS 15.0. Metode statistika analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan fungsional atau kausal antara variabel independent dengan variabel dependent beserta pengaruh signifikasinya seperti yang dikembangkan pada hipotesis. Regresi linear sederhana dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Untuk Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Akuntabilitas Publik

$$Y' = a + bX \dots\dots\dots(1)$$

Y' = Akuntabilitas Publik (nilai yang diprediksikan)

X = Implementasi DPA

a = Konstanta Regresi (nilai Y apabila X=0)

b = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Untuk Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Transparansi

$$Y' = a + bX \dots\dots\dots(2)$$

Y' = Transparansi (nilai yang diprediksikan)

X = Implementasi DPA

a = Konstanta Regresi (nilai Y apabila $X=0$)

b = Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

Model regresi dikatakan baik apabila model tersebut bebas dari asumsi klasik, baik multikolinearitas, autokorelasi, normalitas, dan heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah normalitas dan heteroskedastisitas.

1) Uji normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi secara normal (Purbayu, 2005). Untuk pengujian normalitas peneliti menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian ini digunakan untuk melihat normalitas data, berdasarkan kriteria penerimaan bahwa data dapat dikatakan memiliki distribusi normal jika nilai signifikansi dari *Kolgorov-Smirnov* $> 0,05$.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian regresi dimana varians dari residual untuk satu pengamatan ke pengamatan lain tidak sama. Asumsi yang harus dipenuhi adalah varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antar satu varians dari residual. Gejala varians yang tidak sama disebut dengan gejala heteroskedastisitas, sedangkan adanya gejala varians residual yang sama dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain

disebut homekedastisitas (Purbayu, 2005). Untuk pengujian ini peneliti menguji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden penelitian adalah seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan April 2015 sampai dengan Juni 2015. Pengiriman kuesioner diantar langsung kepada responden dengan waktu pengiriman kuesioner adalah lima hari dengan rentang waktu pengisian kuesioner adalah 14 hari kerja. Ringkasan penyebaran dan pengembalian kuesioner penelitian ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Kuesioner yang disebar	53	100%
Kuesioner yang kembali	53	100%
Kuesioner yang digunakan	53	100%

Sumber : data diolah, 2015

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 53 kuesioner yang disebar, tingkat pengembaliannya sebanyak 100%. Secara keseluruhan kuesioner yang terhimpun kembali dapat digunakan karena data yang disampaikan oleh responden cukup lengkap. Profil dari 53 responden dalam penelitian ini ditunjukkan dalam Tabel 3. Dari Tabel 3 dijelaskan mengenai Jenis Kelamin, Umur, Pendidikan, Jabatan dan Masa Kerja.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa jenis kelamin responden perempuan lebih banyak daripada responden berjenis kelamin laki-laki yaitu responden

perempuan sebanyak 31 responden (58,5 %) sedangkan responden laki-laki sebanyak 22 responden (41,5%). Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan lebih mendominasi proporsi sampel pegawai dikarenakan perempuan lebih mendominasi memiliki jabatan struktural dalam pengelolaan keuangan.

Umur responden menggambarkan tingkat kedewasaan seorang pimpinan sehingga dapat mempengaruhi kinerja instansi. Responden yang memiliki umur 33-39 tahun 10 responden (19%). Responden yang memiliki umur 40-48 tahun 13 responden (24,7%). Responden yang memiliki umur diatas 50 tahun paling banyak yaitu 30 responden (56,3%). Kondisi ini menunjukkan bahwa umur diatas 50 tahun memiliki tingkat kedewasaan yang cukup dalam pengelolaan keuangan.

Tingkat pendidikan digunakan sebagai indikator intelektualitas yang dimiliki. Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa responden yang berpendidikan magister (S2) dengan jumlah responden 16 responden (30,2%). Responden yang berpendidikan sarjana (S1) dengan jumlah 32 responden (60,4%) sedangkan sisanya untuk responden berpendidikan SLTA sebanyak 3 responden (5,7%), SMA sebanyak 1 responden (1,9%), SMEA sebanyak 1 responden (1,9%). Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata responden berpendidikan tinggi dalam pengelolaan keuangan.

Masa jabatan responden menggambarkan tingkat pengalaman sehingga dapat mempengaruhi implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Masa kerja responden menggambarkan lamanya seorang responden menduduki jabatan struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga memiliki pengalaman yang cukup dibidang pengelolaan keuangan.

Tabel 3.
Profil Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
Laki-Laki	22	41,5%
Perempuan	31	58,5%
Total	53	100,0%
Umur		
33-39	10	19%
40-48	13	24,7%
≥50	30	56,3%
Total	53	100,0%
Pendidikan		
S2	16	30,2%
S1	32	60,4%
SLTA	3	5,7%
SMA	1	1,9%
SMEA	1	1,9%
Total	53	100,0%
Jabatan		
Kasi Umum	7	13,2%
Kasubag Administrasi Umum	1	1,9%
Kasubag Anggaran	1	1,9%
Kasubag Keuangan	30	56,6%
Kasubag Tata Usaha	2	3,8%
Kepala Kantor	1	1,9%
Lurah	6	11,3%
Sekcam	1	1,9%
Seklur	3	5,7%
Sekretaris	1	1,9%
Total	53	100,0%
Masa Jabatan		
1 - 5 Tahun	44	83,0%
5 - 15 Tahun	7	13,2%
≥15 Tahun	2	3,8%
Total	53	100,0%

Sumber : data diolah, 2015

Statistik Deskriptif pada penelitian ini disajikan untuk memberikan informasi terkait karakteristik variabel penelitian antara lain: nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi. Ringkasan statistik deskriptif penelitian disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4
Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi DPA	53	2.6	5	4.07	0.57
Akuntabilitas Publik	53	2.63	5	4.02	0.63
Transparansi	53	2.57	5	3.88	0.67

Sumber: data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 4 ditunjukkan statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Jumlah responden (N) adalah 53. Untuk variabel implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran jumlah pernyataan sebanyak 10 pernyataan diketahui besarnya nilai *mean* adalah 4,07 dengan standar deviasi 0,57 nilai maximum sebesar 5 nilai minimum sebesar 2,6. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden menilai implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Badung sudah baik. Untuk variabel Akuntabilitas Publik jumlah pernyataan sebanyak 8 pernyataan diketahui besarnya nilai *mean* adalah 4,02 dengan standar deviasi 0,63 nilai maximum sebesar 5 nilai minimum sebesar 2,63. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden menilai Akuntabilitas Publik sudah baik. Untuk variabel Transparansi jumlah pernyataan sebanyak 7 pernyataan diketahui besarnya nilai *mean* adalah 3,88 dengan standar deviasi 0,67 nilai maximum sebesar 5 nilai minimum sebesar 2,57. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden menilai Transparansi juga baik.

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data diuji dengan statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Distribusi data dikatakan normal jika signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$.

Hasil uji normalitas data pada masing-masing persamaan regresi adalah sebagai berikut:

- (1) Uji normalitas data pada pengaruh implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Akuntabilitas Publik. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 5. Diketahui bahwa signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,458 yang lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusikan normal.
- (2) Uji normalitas data pada pengaruh Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Transparansi. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel 5. Diketahui bahwa signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,166 yang lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusikan normal.

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas
Variabel Implementasi DPA pada Akuntabilitas Publik dan
Transparansi

		Unstandardized Residual DPA pada Akuntabilitas Publik	Unstandardized Residual DPA pada Transparansi
N		53	53
Normal Parameters	Mean	0,0000000	0,0000000
	Std. Deviation	0,35255775	0,45030178
Most Extreme Differences	Absolute	0,117	0,153
	Positive	0,087	0,071
	Negative	0,117	-0,153
Kolmogorov-Smirnov Z		0,855	1,115
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,458	0,166

Sumber: data diolah, 2015

Uji Heteroskedastisitas Untuk pengujian ini peneliti menguji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser*. Distribusi data dikatakan normal jika signifikansi uji t pada uji *Glejser* > 0,05. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6.
Hasil uji heteroskedastisitas
Variabel Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Akuntabilitas
Publik dan Transparansi

	Unstd.	Coefficients	Standardized		
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig
(Constant)	0.267	0.031		8.717	0.000
Implementasi DPA pada Akuntabilitas Publik	-0.053	0.031	-0.231	-1.697	0.096
(Constant)	0.363	0.036		9.98	0.000
Implementasi DPA pada Transparansi	-0.015	0.037	-0.058	-0.418	0.677

Sumber: data diolah, 2015

1) Pengaruh implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Akuntabilitas Publik persamaan regresi Pengaruh Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

$$Y' = 0,936X$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

Koefisien regresi implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (X) sebesar 0,936 artinya jika implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran mengalami peningkatan, maka Akuntabilitas Publik (Y') akan cenderung mengalami peningkatan.

2) Pengaruh implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Transparansi persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + bX$$

$$Y' = 0,893X$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

Koefisien regresi implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (X) sebesar 0,893 artinya jika Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran mengalami peningkatan, maka Transparansi (Y') akan cenderung mengalami peningkatan.

Penelitian ini menguji pengaruh implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Akuntabilitas Publik. Hipotesis pertama (H_1) menyatakan Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif pada Akuntabilitas Publik. Berdasarkan hasil pengujian, dapat diketahui bahwa Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif pada Akuntabilitas Publik Pemerintah Kabupaten Badung-Bali artinya semakin meningkat Akuntabilitas Publik maka Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran semakin meningkat. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama.

Hasil penelitian ini mendukung teori agensi dalam sektor publik karena sebagai agen yang melaksanakan tugas-tugas dari masyarakat, pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanat dari masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Antoro (2006) memperoleh hasil penerapan anggaran berbasis kinerja sebagai bentuk perwujudan reformasi anggaran mampu meningkatkan akuntabilitas publik Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan Ismiarti (2013) menyatakan bahwa implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja. Meutia (2011) menunjukkan variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas berpengaruh

terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Rahmannurrasjid (2008) menjelaskan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mengharuskan pemerintah memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat.

Teodorus (2007) hasil penelitiannya menyatakan penerapan anggaran berbasis kinerja melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berpengaruh positif pada akuntabilitas publik dan transparansi. Werimon (2007) menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi menyebabkan kontrol yang besar dari masyarakat menyebabkan pengelola pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik.

Meskipun Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran mampu meningkatkan Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kabupaten Badung-Bali, tetapi harus diakui bahwa Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Pemerintah Kabupaten Badung saat ini sudah baik walaupun belum sempurna. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif variabel Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran menunjukkan skor rata-rata (mean) sebesar 4,07 skor maksimum sebesar 5. Berdasarkan jawaban yang diberikan responden dalam lembar kuesioner, kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Badung dalam Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran salah satunya adalah Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran belum berjalan sebagaimana mestinya karena ada kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah tidak terlaksana. Untuk Akuntabilitas Publik sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif variabel akuntabilitas publik mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 4,02 dari nilai maksimum 5.

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif pada Transparansi. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif pada transparansi artinya semakin tinggi implementasi

Dokumen Pelaksanaan Anggaran menyebabkan semakin transparan Pemerintah Kabupaten Badung. Untuk transparansi sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil statistik deskriptif variabel transparansi mempunyai nilai rata-rata (mean) sebesar 3,88 dari nilai maksimum 5. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auditya (2013) menghasilkan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif pada kinerja pemerintah daerah sedangkan transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif pada kinerja pemerintah. Meutia (2011) membuktikan bahwa variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efisiensi dan efektivitas berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja. Rahmannurrajjid (2008) menjelaskan penerapan azas akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mengharuskan pemerintah memberikan pertanggungjawaban dan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan pemerintahan sehingga pemerintah berusaha untuk memberikan yang terbaik (kinerja terbaik) kepada masyarakat.

Teodorus (2007) hasil penelitiannya menyatakan penerapan anggaran berbasis kinerja melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berpengaruh positif pada akuntabilitas publik dan transparansi. Werimon (2007) menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi menyebabkan kontrol yang besar dari masyarakat menyebabkan pengelola pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif pada Akuntabilitas Publik Pemerintah Kabupaten Badung-Bali. Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran berpengaruh positif pada Transparansi Pemerintah Kabupaten Badung-Bali. Hasil penelitian dapat memotivasi penelitian yang akan datang, untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan

Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran pemerintah dengan mengembangkan sampel yang lebih luas untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota dan Kabupaten yang ada di Bali.

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran penelitian ini, antara lain: Oleh karena, R^2 79,7 persen dan sisanya 20,3 persen berarti ada variabel lain selain Akuntabilitas Publik sedangkan transparansi R^2 87,6 persen dan sisanya 12,4 persen berarti ada variabel lain selain transparansi karena dalam penelitian ini perubahan Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran juga disebabkan oleh variabel lain selain Akuntabilitas Publik dan Transparansi. Untuk peningkatan Implementasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran diperlukan adanya evaluasi dan pengukuran kinerja yang tepat. Evaluasi dan pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada jumlah persentase realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran, tetapi juga harus berfokus pada prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja. Untuk pelaksanaan laporan pertanggungjawaban didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karena Standar Akuntansi Pemerintah merupakan alat untuk memfasilitasi pelaporan untuk peningkatan akuntabilitas publik dan transparansi.

REFERENSI

- Antoro Dwi Setyawan, 2006. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah*, Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002.
- BPKP, 2002. *Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1*. AKIP. Jakarta.
- Cooper R Donald/Pamela S Schindler, 2006. *Metode Riset Bisnis Volume 1*, McGraw-Hill Irwin.
- Cooper R Donald/Pamela S Schindler, 2006. *Metode Riset Bisnis Volume 2*, McGraw-Hill Irwin.
- Coryanata, Isma, 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan*

Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X. Unhas Makasar.

Departemen Keuangan, *Pokok-Pokok APBN*, Departemen Keuangan, 2006.

Departemen Keuangan, *Pencairan Anggaran Belanja Negara*, Departemen Keuangan, 2006.

Dwiningsih Susetya, 2006. *Persepsi Stakeholder Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. *Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005*. BPFE UGM Yogyakarta.

Garini, Nadia, 2011. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kota Bandung*. Skripsi Bandung FE UNIKOM.

Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Ed.5*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.

Gitosudarmo, Indriyo dan Najmudin, Mohamad, 2003. *Anggaran Perusahaan Edisi 1*, BPFE UGM Yogyakarta.

Guy Peters.B, 2000. *"The Politics of Bureaucracy"*, London : Routledge.

Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat Jakarta.

Hansen, Mowen, 2006. *Management Accounting edisi 7*, Salemba Empat Jakarta.

Indra Bastian, 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga.

Ismiarti, 2013. *Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah*. Tesis Bengkulu Program Magister Akuntansi FE Unib.

Iwardono, 2001. *Sekelumit Analisa Regresi dan Korelasi*, BPFE UGM Yogyakarta.

Krina, 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.

- Lind A Douglas William G Marchal, Samuel A Wathen, 2005. *Statistical Techniques in Business Economics*, Mc Graw-Hill.
- Mahmudi, 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, 2005. *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Mohamad Mahsun, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Pasaribu. FJ, 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan SKPD Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD*. Tesis Medan. Program Pasca Sarjana Univ. Sumatera Utara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang *Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*.
- Purbayu Budi Santosa, Ashari, *Analisis Statistik dengan Microsoft excel dan SPSS*, Penerbit Andi 2005.
- Rahmannurrasjid, Amin, 2008. *Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah*. Tesis tidak dipublikasikan. Semarang. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Sugiyanto, 2004. *Analisis Statistika Sosial*. Bayu Media, Jawa Timur.
- Suparno, 2012. *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah. Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kota Dumai)*. Tesis Medan. Program Pasca Sarjana Univ. Sumatera Utara.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA

Suryadhi Joko Putranto.SH, 2007. *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Menunjang Pelaksanaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

Teodorus Parhusip Poltak, 2007. *Pengaruh Penerapan Anggaran Barbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik dan Transparansi di Pemerintah Kota/Kabupaten yang terjadi pemekaran*, Tesis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara.*

Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara.*

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*

Werimon, Simson, Imam Ghozali, & M. Nasir, 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).* Makalah disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. Hal 21-23.